

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	21
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	21
2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi	22
3. Jenis Tindak Pidana Korupsi	23
4. Subyek Tindak Pidana Korupsi	25

5. Sanksi Tindak Pidana Korupsi	26
B. Tinjauan Tentang Pidana Minimum Khusus	28
1. Sistem Perumusan Pidana	28
2. Pidana Minimum Khusus	30
C. Tinjauan Umum Tentang Penjatuhan Pidana	33
1. Pengertian Penjatuhan Pidana	33
2. Syarat Penjatuhan Pidana	34
3. Putusan Penjatuhan Pidana	35
D. Tinjauan Umum Tentang Pedoman Pemidanaan	41
1. Penyempurnaan Undang-Undang Hukum Pidana	42
2. Penggunaan Data-Data Pemidanaan	46
3. Penggunaan “ <i>Checking-List</i> ” atau “Tabel Pemidanaan”	49
4. <i>Predictive Table</i> -Tabel Peramal	50
5. Penggunaan Patokan Pidana Bagi Beberapa Tindak Pidana	55
6. Peninjauan Kembali Ukuran Pidana Oleh Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung	58
7. Pembentukan <i>Sentencing Institute</i> Atau <i>Sentencing Council</i>	61
E. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan	63
1. Sistem Pemidanaan	63
2. Tujuan Pemidanaan	65

F. Tinjauan Umum Tentang PERMA No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	69
G. Tinjauan Umum Tentang Independensi Kekuasaan Kehakiman.....	80
1. Pengertian Independensi Kekuasaan Kehakiman.	80
2. Pembagian Independensi Kekuasaan Kehakiman.....	82
Kebebasan Ekstensial Hakim.	84
3. Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana.	86
BAB III METODE PENELITIAN	89
A. Jenis dan Sifat Penelitian.	89
B. Data Penelitian	91
C. Cara dan Alat Memperoleh Data	93
D. Analisis Data.....	94
E. Jalannya Penelitian.	95
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	98
A. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	98
1. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk Atas Nama Terdakwa Supriyono.	98
a. Kasus Posisi	98
b. Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan Majelis Hakim.	103
c. Analisis Putusan	111

2. Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr Atas Nama Terdakwa	
Lalu Ahmad Yudni	119
a. Kasus Posisi.....	119
b. Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan Majelis Hakim	125
c. Analisis Putusan	133
3. Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr Atas Nama	
Terdakwa Sahyan.	143
a. Kasus Posisi.....	143
b. Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan Majelis Hakim.	149
c. Analisis Putusan	157
B. Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Perkara	
Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Prinsip Independensi Hakim	167
1. Kedudukan Hakim Dalam Konstitusi Indonesia.....	167
2. Independensi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap	
Ancaman Pidana Minimum Khusus.....	173
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	182
A. Kesimpulan.....	182
B. Saran	183
DAFTAR PUSTAKA	185
INDEKS SUBJEK.....	190
INDEKS ISTILAH.....	192
GLOSARIUM.....	193